

HINGGA MARET 2023

OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua ketentuan yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi Maret 2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Peraturan POJK yang dikeluarkan terdiri POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

"Perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan tersebut diharapkan dapat meneruskan momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan," kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (15/9).

Dikatakan, perpanjangan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung per-

tumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi gejala setelah kebijakan ini berakhir.

Wimboh Santoso menjelaskan, POJK Nomor 17/POJK.03/2021 ini merupakan Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam ketentuan ini, masa berlaku kebijakan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023.

Kebijakan tersebut mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon sampai Rp 10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas

existing.

POJK ini tetap menekankan agar perbankan tetap menerapkan prinsip manajemen risiko dalam rangka implementasi perpanjangan kebijakan stimulus perekonomian tersebut.

Sementara POJK Nomor 18/POJK.03/2021 merupakan Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 yang menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai 31 Maret 2023.

POJK ini tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.

Perpanjangan kedua ketentuan terkait kebijakan stimulus ekonomi diharapkan dapat menjaga stabilitas kinerja baik dari sisi perbankan maupun pelaku usaha sektor riil yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. (Lmg)-f

PENANGANAN KORBAN KEBAKARAN LAPAS

25 Jenazah Berhasil Diidentifikasi

JAKARTA (KR) - Sampai saat ini 25 jenazah korban kebakaran Lembaga Pemasarakan (Lapas) Kelas I Tangerang sudah berhasil diidentifikasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri. Dengan demikian, kata

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarij, tinggal 16 korban lagi yang masih diidentifikasi Tim DVI dan dokter forensik. "Bagi Tim DVI Polri tidak mudah melakukan identifikasi. Namun, dengan kerja keras dan profesionalnya, Polri berhasil mengidentifikasi 25 jenazah," jelas Edward Omar Sharif Hiarij, Rabu (15/9).

Sehubungan hal ini, Kemenkumham, pada saat bersamaan juga menyerahkan salah seorang jenazah korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang sekaligus pemberian santunan sebagai bentuk tali asih sebesar Rp 30 juta. Selain itu, Kemenkumham juga memberikan bantuan Rp 6,5 juta untuk biaya pemakaman.

Eddy Hiarij berpesan agar ahli waris dan pihak keluarga korban tidak melihat bantuan tersebut dari jumlahnya. Tetapi, lebih kepada bentuk tanggung jawab negara atas kejadian tersebut. "Kemenkumham menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Kejadian ini sama se-

kali tidak kita inginkan," katanya.

Lapas Kelas I Tangerang terbakar Rabu (8/9) dini hari. Sekretaris Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Sespodokkes) Polri Kombes Pol Pramujoko mengatakan, Tim DVI Mabes Polri mengandalkan data pembanding berupa DNA dari keluarga untuk mengidentifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang.

Selain berdasarkan DNA, jelasnya, juga mengidentifikasi korban kebakaran melalui ciri khas pada tubuh. "Saat ini kita hanya mengandalkan pemeriksaan DNA sebagai utama (primary), ditambah data pada tubuh secara umum, misalnya, jenis kelamin, tinggi badan, sedikit rambut yang tersisa pada korban," kata Pramujoko di RS Polri Kramat Jati Jakarta.

Hingga kini sebanyak 25 jenazah yang telah berhasil teridentifikasi dari total 41 jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang. Pramujoko menambahkan, pihaknya bekerja cepat dalam mengungkap identitas diri korban kebakaran Lapas Tangerang. "Sisa yang ada Insya Allah kita bekerja cepat sesuai harapan masyarakat untuk bisa menyelesaikan. Tapi kita mohon maaf kepada masyarakat untuk bersabar karena pemeriksaan DNA tak gampang," ujar Pramujoko. (Ful)-f

PEMBUATAN DI SEBUAH KOS DI BOYOLALI

Bea Cukai Amankan Ribuan Miras Palsu



KR-Mulyawan

Petugas Polsek Teras, Boyolali memeriksa TKP pembuatan miras palsu.

BOYOLALI (KR) - Pabrik minuman keras (miras) palsu yang berada di Dukuh Puluhkadang Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Jateng terlihat lengang setelah sebelumnya digerebek Bea Cukai Surakarta. Dari ha-

sil penggerebekan itu, petugas mengamankan ribuan botol miras palsu yang sudah dikemas dan siap dijual secara eceran.

Kapolres Boyolali, AKBP Morry Ermond melalui Kapolsek Teras, AKP Agus Marjoko membenarkan ke-

jadian tersebut. "Ya, sebuah kos milik MDL warga Dukuh Puluhkadang digerebek petugas Bea Cukai. Dari informasi yang didapat, Bea Cukai Surakarta menyita 1.886 botol miras yang berbagai merk yang diduga palsu," ujar

Agus Marjoko, Rabu (15/9).

Menurutnya, dari hasil cek lokasi petugas Polsek Teras di TKP, didapati penyegelan dari Bea Cukai Surakarta. Sementara ini, polisi melakukan pemantauan terkait dengan apa yang dilakukan MDL.

Dikatakan AKP Agus Marjoko, dari hasil cek lokasi petugas menemukan beberapa botol miras kosong dari berbagai merk yang diduga untuk memalsukan merk miras. "Dari TKP petugas menemukan botol putih satu literan yang ditata rapi dan beberapa botol bekas minuman bermerk terkenal," ungkapnya.

Sementara, menurut pengakuan orangtua pelaku, PH mengatakan, yang diamankan petugas Bea Cukai Surakarta adalah anaknya. (M-2)-f

BANK BPD DIY

Mengucapkan Selamat Kepada
Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Penghargaan Menteri Keuangan RI atas



Penilaian WTP
11x Berturut-turut
Sejak 2010 s.d 2020



Bank BPD DIY



@bpdidiy

www.bpdidiy.co.id



1500061

JALANKAN TUGAS PRESIDENSI G20

RI Perhatikan Negara Berkembang-Kelompok Rentan

JAKARTA (KR) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, selama memegang tongkat estafet Presidensi G20 yang dimulai 1 Desember 2021, Indonesia akan memegang semangat utama pulih bersama. Untuk itu diperlukan semangat inklusivitas, solidaritas, kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan.

"Inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia," kata Retno LP Marsudi mengenai kesiapan Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (15/9).

Retno menegaskan, Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang baik di Asia, Afrika, Amerika Latin, terma-

suk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. "Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen," imbuhnya.

Selama menjalankan tugas Presidensi G20 ini, papar Menlu, selain isu kesehatan dan pandemi serta pembangunan berkelanjutan, perhatian besar akan diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi. "Kita ingin mendorong pengakuan atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja," terangnya.

Selain itu, akan diselenggarakan pula forum bisnis dan kemitraan di sektor infrastruktur berkelanjutan dan investasi kesehatan. "Kita perlu memperkuat sektor-sektor tersebut untuk mencapai pemulihan, pertumbuhan, dan ketahanan bersama,"

andasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, dengan menjadi tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global.

"Dengan menjadi Presidensi 2022, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pascapandemi Covid-19 ini," ungkap Airlangga.

Disampaikan, rangkaian G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 ini berjumlah 150 pertemuan yang terdiri pertemuan konferensi tingkat tinggi, pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat working group, dan pertemuan tingkat engagement group, serta side events. (Sim)-d

Vaksinasi Lancar, Pariwisata Berpotensi Pulih

JAKARTA (KR) - Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, yang ditunjukkan dengan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan. Dalam upaya pemulihan pariwisata tahun 2021, Pemerintah Indonesia tetap memberikan prioritas pada aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat, antara lain melalui penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19.

"Dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di masa pandemi ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE). Protokol kesehatan berbasis CHSE menjadi standar persiapan destinasi wisata," kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada Hybrid Event Leaders Summit Asia - Global Tourism Forum (GTF) 2021, di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (15/9).

Untuk mewujudkan standar tersebut, lanjut Wapres, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE.

Di samping itu, menurut Wapres, program vaksinasi juga diharapkan mampu menjadi basis yang kuat menuju pemulihan sektor pariwisata.

"Program vaksinasi dilaksanakan dengan sasaran dan skala prioritas yang tepat untuk mencapai herd immunity pada akhir Tahun 2021. Sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, ditargetkan 77 persen atau sekitar 208 juta dari penduduk Indonesia dapat divaksinasi. Hal ini akan menjadi game changer bagi sektor pariwisata," urai Wapres.

Wapres juga menuturkan, pemerintah melihat bahwa tren wisata dunia juga diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, tidak saja di negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Bagi Indonesia, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim (moslem friendly tourism) di destinasi wisata, seperti akomodasi, restoran atau makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Dalam implementasinya, pengembangan wisata halal masih terkendala oleh masih rendahnya literasi masyarakat. (Sim)-f